

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PEMAKSAAN BUDAYA DALAM PERKAWINAN

Oleh : Vatma Bella Ibriziyana Anwar  
Dosen Pembimbing Utama : **Yayuk Sugiarti, SH.,MH**  
Dosen Pembimbing Pendamping : **Abshoril Fithry, S.H.,M.H.**

Pemaksaan perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, termasuk ke dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pemaksaan perkawinan bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku karena dapat merusak masa depan seorang anak maupun perempuan. Pemaksaan perkawinan adalah praktik perkawinan, yang salah satu pihak mengalami paksaan, biasanya terjadi kepada perempuan, sebagai pihak dianggap melakukan pelanggaran adat atau alasan tertentu lainnya terkait dengan hukum adat berlaku, di komunitas tempat pasangan tersebut tinggal.

Perumusan masalah dari skripsi ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak akibat pemaksaan dalam perkawinan yang berdampak pada psikis anak dan Bagaimana tanggungjawab hukum terhadap pelaku pemaksaan dalam perkawinan yang berdampak buruk. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui dan mendapatkan solusi dari rumusan masalah tersebut.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan beberapa sumber bahan hukum primer dan sekunder, serta penelusuran bahan hukum melalui perundang-undangan dan literatur lainnya.

Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pernikahan karena paksaan terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan dengan Perlindungan Hukum Preverentif dimana Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran dan Perlindungan Hukum Represif Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara atau hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Pengenaan sanksi pidana kekerasan seksual dalam pemaksaan perkawinan menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu dikenakan pidana penjara dan denda.. Selain ancaman pidana penjara dan denda, penerapan sanksi pidana tambahan restitusi. Pelaku tindak pidana kekerasan seksual, sanksi pidananya dapat menjadi berat apabila korban dari tindak pidana tersebut masih tergolong anak, penyandang disabilitas serta anak yang mempunyai disabilitas.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum Anak, Pemaksaan Perkawinan.

## **ABSTRACK**

### **LEGAL PROTECTION OF CHILDREN DUE TO CULTURAL FORCE IN MARRIAGE**

By : Vatma Bella Ibriziyana Anwar  
Main Supervisor : *Yayuk Sugiarti, SH.,MH*  
Assistant Supervisor : *Abshoril Fithry, S.H.,M.H.*

Forced marriage according to Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence, is included in the Crime of Sexual Violence. Forced marriage is contrary to the laws and regulations in force because it can damage the future of a child or woman. Forced marriage is the practice of marriage, where one of the parties is forced, usually on women, as the party is deemed to have violated customs or certain other reasons related to applicable customary law, in the community where the couple lives.

The formulation of the problem of this thesis is: How is legal protection for children due to coercion in marriage which has an impact on the child's psychology and what is the legal responsibility for perpetrators of coercion in marriage which has a negative impact. The purpose of writing this thesis is to find out and get a solution to the problem formulation.

The research method in writing this thesis is normative using a statutory approach with several sources of primary and secondary legal materials, as well as tracing legal materials through legislation and other literature.

Legal protection for children who enter into forced marriages against minors can be carried out with preventive legal protection, where protection is provided by the government with the aim of preventing violations before they occur and repressive legal protection. This protection is the final protection in the form of sanctions such as fines, imprisonment or punishment. additional provisions are given if a dispute has occurred or a violation has been committed. This protection aims to resolve disputes.

The imposition of criminal sanctions for sexual violence in forced marriage according to the Sexual Violence Crime Law is subject to imprisonment and fines. Apart from the threat of imprisonment and fines, additional criminal sanctions of restitution are applied. Perpetrators of criminal acts of sexual violence, the criminal sanctions can be severe if the victims of these crimes are still children, people with disabilities or children who have disabilities.

**Keywords:** *Legal Protection of Children, Forced Marriage.*